



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E nonr 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015.**

Pasal I

Ketentuan BAB III pada Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 diubah, sehingga keseluruhan Ketentuan BAB III pada Lampiran Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 9 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Otonomi daerah diselenggarakan dengan salah satu pertimbangan yang mendasari adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya. Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing - masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap system pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga

tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah :

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah memberi gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi ekonomi tahun 2015, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi daerah yang dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2015.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Dengan melihat kinerja ekonomi makro, diharapkan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dirumuskan lebih baik. Hal demikian mengonfirmasikan bahwa perencanaan tahunan menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam merumuskan *budget policy* tahun berkenaan. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor:

- a. Sektor pertanian;
- b. Sektor pertambangan dan penggalian;
- c. Sektor industri pengolahan;
- d. Sektor listrik, gas dan air bersih;
- e. Sektor bangunan;
- f. Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
- g. Sektor angkutan dan komunikasi;
- h. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan
- i. Sektor jasa-jasa.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2015. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka sasaran ekonomi pada tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan - kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan dan pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (core business daerah) yang meliputi: agribisnis, industri manufaktur, dan pariwisata.
- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang

- memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.
 - e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

Selama lima tahun terakhir, kegiatan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur mengalami percepatan/peningkatan produktivitas ekonomis, seperti terlihat grafik berikut:

Grafik III.1 :
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013



sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013
*Data Prov.Kaltim termasuk Kaltara

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Hal ini karena pertumbuhan ADHK merupakan pertumbuhan riil faktor-faktor produksi tanpa dipengaruhi faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Angka pertumbuhan tersebut menggambarkan peningkatan aktifitas perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah seluruh aktifitas ekonomi di suatu region/ wilayah. Dengan kata lain, data PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga tercipta nilai tambah

PDRB dikelompokkan menjadi tiga kelompok sektor, yakni kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Kelompok sektor primer mencakup sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang memproduksi bahan-bahan dasar. Kelompok sektor sekunder yang memproduksi input kelompok sektor primer, terdiri atas sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan sektor lain termasuk kelompok sektor tersier.

Tabel III.1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No.	Lapangan Usaha dan Kelompok sector		PDRB (jutaan Rupiah)		Pertumbuhan (%)ADHK	Distribusi (%)	
			ADHB	ADHK		ADHB dengan migas	ADHB tanpa migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pertanian	Sektor Primer	28 658 808	8 664 167	4,67	6,74	10,11
2	Pertambangan dan penggalian		182 538 602	51 237 177	(0,23)	42,91	42,75
	Pertambangan dan penggalian@		118 894 777	36 330 677	2,21	28,49	
3	Industri pengolahan Industri pengolahan@	Sektor sekunder	104 456 214	26 232 254	(3,93)	24,55	8,43
			23 898 769	7 008 732	6,54	5,62	
4	Listrik, Gas,dan air bersih		1 192 155	457 314	4,47	0,28	0,42
5	Bangunan		14 494 878	6 053 293	10,13	3,41	5,11
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Sektor Tersier	40 904 287	12 502 437	5,93	9,61	14,43
7	Pengangkutan & komunikasi		18 752 990	8 487 588	7,56	4,41	6,61
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan		14 979 037	5 300 571	12,93	3,52	5,28
9	Jasa-jasa		19 452 403	3 055 685	8,25	4,57	6,86
PDRB			425 429 376	121 990 486	1,59	100,00	100,00
PDRB @			283 531 972	87 860 464	5,17		

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha (sektor) Tahun 2013

Hingga akhir tahun 2013 kondisi perekonomian global masih menunjukkan gejala yang *ambigu*, di satu sisi terlihat ada perbaikan, namun di sisi lain menunjukkan kondisi sebaliknya. Kondisi ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan pelemahan nilai mata uang berbagai Negara (termasuk nilai tukar uang Rupiah) dan situasi perdagangan internasional yang belum stabil, seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi (migas, batubara). Kondisi tersebut secara langsung telah memberikan dampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 ini nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku

tercatat sebesar Rp 425,4 triliun, dan jika komoditi Migas diabaikan (PDRB Tanpa Migas) mencapai Rp 283,5 triliun. Jika dihitung atas dasar harga konstan 2000, PDRB Kalimantan Timur dengan Minyak dan Gas Bumi (Migas) pada Tahun 2013 mencapai Rp 121,99 triliun, adapun Tanpa Migas PDRB Konstan mencapai Rp 87,96 triliun.

Menurut sektor ekonomi atas dasar harga berlaku, pada Tahun 2013 sektor Pertambangan dan Penggalian menghasilkan “*kue ekonomi*” terbesar yaitu Rp 182,5 triliun, dengan sumbangan Pertambangan Tanpa Migas (Batubara) sebanyak Rp 118,9 triliun. Selanjutnya diikuti sektor Industri Pengolahan dengan nilai tambah bruto (NTB) sebesar Rp 104,5 triliun dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp 40,9 triliun serta sektor Pertanian sebesar Rp 28,7 triliun. Sedangkan sektor lainnya NTB-nya masih dibawah Rp 20 triliun. Tabel III.2

PDRB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur (Miliar Rp.)

No	Lapangan Usaha	Berlaku		Konstan 2000	
		2012	2013	2012	2013
1	Pertanian	26.571,2	28.658,8	8.277,8	8.664,2
2	Pertambangan & Penggalian	197.669,8	182.538,6	51.357,3	51.237,2
	2a. Minyak dan Gas Bumi	68.334,9	61.34	15.812,9	14.906,5
	2b. Pertambangan Tanpa Migas	127.414,6	118.894,8	34.741	35.411,6
3	Industri Pengolahan	98.654,4	104.456,2	27.306,3	26.232,3
	3a. Industri Migas	78.393,1	80.557,4	20.727,7	19.223,5
	3b. Industri Tanpa Migas	20.261,3	23.898,8	6.578,7	7.008,7
4	Listrik & Air Bersih	1.120,3	1.192,2	437,8	457,3
5	Bangunan	12.487,2	14.494,9	5.496,7	6.053,3
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	36.765,6	40.904,3	11.802,3	12.502,4
7	Pengangkutan & Komunikasi	16.652,2	18.753	7.891,2	8.487,6
8	Keuangan Persewaan	12.122,9	14.979	4.693,7	5.300,6
9	Jasa-jasa	17.463,8	19.452,4	2.822,8	3.055,7
	PDRB	419.507,2	425.429,4	120.085,8	121.990,5
	PDRB Tanpa Migas	272.780,1	283.532	83.545,2	87.860,5
	PDRB (Tanpa Migas dan Batubara)	145.365,4	164.637,2	48.804,2	52.448,9

Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur, 2014

b. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2013 Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada tahun 2013 dengan migas lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2012 yang tumbuh 1,59 persen. Sama halnya jika dilihat dari pertumbuhan Tanpa Migas pada tahun 2013 lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 5,17 persen.

Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur (*Persen*)

Lapangan Usaha	Tahun	
	2012	2013
(1)	(4)	(5)
1. Pertanian	5,66	4,67
2. Pertambangan dan Penggalian	5,07	(0,23)
2.a. Minyak dan Gas Bumi	(8,70)	12,75
2.b. Pertambangan Tanpa Migas		(5,73)
3. Industri Pengolahan	(5,91)	(10,06)
3.a. Industri Migas	10,09	(7,26)
3.b. Industri Tanpa Migas		6,54
4. Listrik dan Air Bersih	8,12	4,47
5. Bangunan/Konstruksi	14,08	10,13
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,27	5,93
7. Pengangkutan dan Komunikasi	11,85	7,56
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Per.	16,65	12,93
9. Jasa-jasa	10,65	8,25
PDRB	3,98	1,59
PDRB (Tanpa Migas)	11,21	5,17
PDRB (Tanpa Migas dan Batubara)	10,14	7,47

Sumber: BPS, 2014

Jika ditinjau dari sisi lapangan usaha (sektor), pada tahun 2013 hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertambangan. Pada tahun 2013, sektor Industri Pengolahan mengalami koreksi sebesar negatif 3,93 persen, dipengaruhi penurunan subsektor Industri Migas sebesar negatif 7,26 persen. Sama halnya sektor Pertambangan mengalami penurunan sebesar negatif 0,23 persen,

sebagai dampak harga batu bara turun. Untuk sektor lainnya, semuanya tumbuh positif dimana sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 dengan pertumbuhan sebesar 12,93 persen, diikuti bangunan (10,13 persen), sektor Jasa-jasa (8,25), sektor Angkutan dan Komunikasi (7,56 persen), sektor perdagangan (5,93 persen), sektor Pertanian (4,67 persen), sektor dan sektor Listrik dan Air Bersih (4,47 persen).

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional tentu akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012-2013

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan hingga akhir tahun 2013 kondisi perekonomian global masih menunjukkan gejala yang *ambigu*, di satu sisi terlihat ada perbaikan, namun di sisi lain menunjukkan kondisi sebaliknya. Kondisi ini salah satunya dapat ditunjukkan dengan pelemahan nilai mata uang berbagai Negara (termasuk nilai tukar uang Rupiah) dan situasi perdagangan internasional yang belum stabil, seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi (migas, batubara). Kondisi tersebut secara langsung telah memberikan dampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur pada Tahun 2013 dan tentunya juga bagi kabupaten Penajam Paser Utara.

a). PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Penajam Paser Utara

Sejalan dengan perekonomian nasional dan provinsi, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah yang mengandalkan kinerja komoditas ekspor primer khususnya komoditas migas dan batu bara, ikut bertahan dari situasi eksternal perekonomian global. Penajam Paser Utara menjadi kuat terhadap imbas krisis ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari penciptaan nilai PDRB di Kalimantan Timur yang terus meningkat. PDRB Penajam Paser Utara

yang tercipta pada tahun 2013 mencapai 4.375,55 miliar rupiah, lebih tinggi dibanding tahun 2012 (4.106,82 miliar rupiah). Secara riil ekonomi Penajam Paser Utara tumbuh 3,75 persen (dengan migas) atau 5,15 persen (tanpa migas).

Secara singkat capaian indikator ekonomi ditinjau dari sektor ekonomi, semua sektor mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor strategis dalam perekonomian Penajam Paser Utara. Nilai tambah sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya, yaitu dari 1.508,79 miliar rupiah di tahun 2011 menjadi 1.604,63 miliar rupiah di tahun 2012 atau naik sebesar 95,84 miliar rupiah. Namun pada tahun 2013, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu 706,65 miliar di tahun 2012 menjadi 775,57 miliar pada tahun 2013 atau naik sebesar 69 miliar, dibandingkan sektor pertambangan yang mengalami kenaikan hanya 49 miliar, terjadi perlambatan kenaikan nilai tambah dibanding periode sebelumnya dimana tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 531,20 miliar rupiah.

Subsektor pertambangan tanpa migas menciptakan nilai tambah 256,55 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 12,38 miliar rupiah dari tahun 2011. Hal ini dikarenakan produksi batu bara di Penajam Paser Utara pada tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2011 dikarenakan pengaruh penurunan harga batu bara dunia.

Tabel III.4
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000 Migas dan tanpa Migas
menurut Lapangan Usaha 2018-2013 (Persen)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012 *)	2013 *)
1. Pertanian	7,74	-0,97	11,53	4,42	5,76	3,93
2. Pertambangan & Penggalian	0,42	1,81	3,09	13,09	1,65	1,27
3. Industri Pengolahan	7,52	5,69	7,33	6,29	2,95	4,89
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	13,79	5,97	7,71	21,84	5,92	6,78
5. Bangunan	4,99	5,51	8,02	16,93	5,83	4,21
6. Perdag, Hotel & Restoran	9,77	7,62	13,72	20,03	5,01	5,83
7. Pengak, & Komunikasi	5,78	6,18	9,49	39,52	7,79	5,86
8. Keu, Persew, & Jasa Perush,	7,73	8,30	12,21	14,38	8,71	11,22
9. Jasa-jasa	14,15	6,77	6,74	7,73	5,93	5,57
PDRB Kab. PPU	4,99	3,51	7,28	11,68	3,61	3,75
PDRB Kab. PPU @	8,33	4,70	10,03	17,56	4,39	5,15
PDRB Kab. PPU @@	8,33	4,70	10,03	10,76	4,84	5,26

Keterangan : *) Angka Sementara) Angka Revisi
@ Tanpa Migas @@ Tanpa Migas dan Batu bara

Sumber data diolah

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara selama dua tahun terakhir mulai stabil pada kisaran 3,61 dan 3,75 persen, setelah sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2011 sebesar 11,68 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi pada sektor keuangan, persewaan, Jasa dan perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 11,22 persen setelah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2012 hanya sebesar 8,71 persen dibanding tahun 2011 sebesar 14,38 persen. Sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,27 persen dari tahun sebelumnya sebesar 1,65 persen.

b). Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan pertumbuhan ekonomi dari sembilan sektor ekonomi, Dan rata -rata dari Sembilan sektor ekonomi tersebut membentuk pertumbuhan ekonomi, Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi regional berkaitan erat dengan pertumbuhan masing-masing sektor dan sub sektor. Sektor yang mendominasi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Sektor pertambangan sebesar 883,01 miliar, industri pengolahan sebesar 480,93 miliar, perdagangan hotel dan restoran sebesar

386,71 miliar disusul sektor pertanian sebesar 333,94 miliar, sehingga pergerakan produksi maupun harga pada komoditas minyak mentah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sektor-sektor ekonomi selain sektor pertambangan dan penggalian harus terus didorong untuk dapat menggantikan peran sektor pertambangan dan penggalian yang bersifat tidak terbarukan.

Tabel III.5
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Tahun 2012 - 2013 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2000	
	2012 ^{a)}	2013 ^{b)}	2012 ^{a)}	2013 ^{b)}
1. Pertanian	678,15	731,02	321,31	333,94
2. Pertambangan dan Penggalian	1.604,63	1.653,65	871,95	883,01
3. Industri Pengolahan	593,85	646,20	458,52	480,93
4. Listrik dan Air Bersih	8,92	9,72	5,36	5,73
5. Bangunan	128,25	134,39	74,54	77,68
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	706,65	775,57	365,39	386,71
7. Pengangkutan dan Komunikasi	60,29	65,19	36,98	39,14
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	107,45	121,97	71,58	79,61
9. Jasa-Jasa	218,63	237,83	90,54	95,59
PDRB	4.106,82	4.375,55	2.296,18	2.382,35
PDRB Tanpa Migas	2.769,31	3.002,04	1.512,18	1.590,05

Keterangan : ^{a)} Angka Sementara^{b)} Angka Revisi
Sumber data diolah

c). PDRB Menurut Penggunaan Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan perkembangan PDRB menurut komponen penggunaan tahun 2012 terjadi perbaikan agregat konsumsi rumah tangga dari Rp. 1,124 triliun menjadi Rp. 1,125 triliun dan tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1,350 triliun. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan sejalan dengan skenario peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Demikian pula terhadap agregat permintaan kebutuhan daerah dari sisi impor terus meningkat. Dari angka Rp. 1,943 triliun rupiah pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 2,040 triliun lebih, kedua indikator diatas menunjukkan bahwa

kebutuhan daerah terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari sisi produktifitas daerah cenderung stagnan, hal ini terlihat dari kecilnya pertumbuhan agregat ekspor daerah yang dalam dua tahun terakhir tetap berada pada kisaran Rp. 2,6 triliun, namun pada tahun 2013 sisi produktifitas daerah mengalami peningkatan menjadi 2,816 triliun lebih. Meskipun hal ini menandakan bahwa prduktifitas ekonomi masyarakat belum berkembang secara signifikan dari kondisi tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.6
 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara (ADHB)
 Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2013 (Miliar Rupiah)

Uraian	2011	2012*)	2013**)
Konsumsi Rumah Tangga	1.124,53	1.255,55	1.350,11
Konsumsi LNPR	43,75	45,75	49,96
Konsumsi Pemerintah	709,05	808,48	893,35
PMTB	1.121,29	1.240,88	1.290,16
Perubahan Inventori	15,38	16,02	16,54
Ekspor	2.655,97	2.683,50	2.816,19
Impor	1.824,83	1.943,35	2.040,76
Total PDRB	3.845,14	4.106,82	4.375,55

*Keterangan : *) Angka Sementara) Angka Revisi
 Sumber data diolah*

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB Penajam Paser Utara menurut penggunaan juga dihitung atas dasar harga konstan 2000 (ADHK 2000) atau dengan kata lain berbagai produk dinilai menurut harga yang terjadi pada tahun 2000. Melalui pendekatan tersebut nilai PDRB yang dihitung menggambarkan tentang perubahan PDRB berdasarkan volume atau menjelaskan perubahan atas pengaruh faktor kuantitas saja, tanpa adanya pengaruh harga.

Tabel III.7
 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara (ADHK
 2000) Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2011-2013 (Miliar Rupiah)

Uraian	2011	2012*)	2013**)
Konsumsi Rumah Tangga	411,02	430,94	447,22
Konsumsi LNPR	32,53	33,02	33,56
Konsumsi Pemerintah	580,76	615,34	657,60
PMTB	930,05	980,55	1.003,53
Perubahan Inventori	5,74	5,96	6,07
Ekspor	1.276,88	1.287,64	1.323,10
Impor	1.020,89	1.057,27	1.088,73
Total PDRB	2.216,08	2.296,18	2.382,35

Keterangan : *) Angka Sementara) Angka Revisi

Selama kurun waktu 2010-2012, PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan hingga mencapai 2,38 triliun rupiah pada tahun 2012. Peningkatan ekonomi secara riil ini, dipicu oleh membaiknya kinerja konsumsi akhir dari berbagai komponen penggunaan terutama net ekspor Penajam Paser Utara yang masih positif.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012-2013,serta permasalahan tahun 2014 maka perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014 sebesar 3,8% naik 0,7% dari tahun 2013, Sementara Worldbank memperkirakan pertumbuhan hanya 3,0% yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,1%.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2014 diyakini berkisar antara 5,5% – 5,8% setelah tumbuh sebesar 5.6% pada 2013. Persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah defisit neraca pembayaran dan transaksi berjalan, fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi, serta tingginya harga minyak dan bahan pangan. Kita juga akan menghadapi agenda besar politik nasional (pemilu dan pilpres) yang berpotensi menimbulkan selisih sosial. Meski demikian,

pemerintah masih percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6% (asumsi APBN 2014).

Jika lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional adalah government expenditure. Kaltim justru mengalami paradoks karena anggaran yang bersifat ekspansif, justru berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. APBD Kaltim tahun 2013 meningkat 116% dibanding tahun 2010. Pada saat yang sama, pertumbuhan tahun 2013 sebesar (2,2%) jika dibandingkan tahun 2010 (5,10%) tumbuh negatif sebesar 2,90%.

Dari sisi harga batu bara terjadi perbaikan sehingga mendukung pertumbuhan produksi batubara Kaltim. Perbaikan harga batu bara dan peningkatan permintaan diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2014 sehingga tumbuh berkisar antara 3% – 4%. Inflasi pun diperkirakan sebesar 5.85% setelah melonjak tinggi pada tahun 2013 hingga mencapai 9,65%.

Kerangka ekonomi makro tahun 2015 didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 lingkungan eksternal diprediksikan bahwa lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- c. Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.
- d. Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
- e. Ketiga, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh

lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil khususnya pengembangan industri berbasis pertanian, penyiapan dana kredit usaha bagi usaha kecil dan menengah, hal ini diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk

menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
- 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
- 4) Meningkatkan program pelayanan dasar bagi masyarakat terutama dibidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- 6) Membangun landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang representatif, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014-2015

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim memprediksi ekonomi Kaltim pada kuartal II/2014 mengalami perbaikan dengan laju inflasi lebih terjaga. Pertumbuhan ekonomi Kaltim diprediksi berkisar 2,2%-2,7% dan inflasi sekitar 7,5%-7,9%. Peningkatan permintaan domestik menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim. Ini juga didukung perbaikan ekonomi global yang memberikan dorongan pada permintaan komoditas.

Kuartal II/2014, BI Kaltim memprediksi sektor pertanian tumbuh kisaran 7,6%-8,1%, meningkat setelah alami perlambatan pada kuartal sebelumnya tercatat 6,89%. Perlambatan terjadi pada subsektor tanaman bahan pangan dikonfirmasi produksi padi sawah. Sementara itu, sektor industri pengolahan Kaltim pada kuartal II/2014 diprediksi masih akan alami kontraksi/penurunan 1,1% - 1,6%, kendati diproyeksikan membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 1,67% (yoy). Adapun sektor pertambangan diperkirakan tumbuh 0,0%-0,5%.

BI Kaltim mencatat kuartal I/2014 pertumbuhan ekonomi Kaltim 2,44% lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV/2013 mencapai 1,69%. Struktur ekonomi Kaltim dalam 10 tahun terakhir semakin didominasi oleh sektor non migas yakni pertambangan batubara menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim kuartal I/2014. Produksi batu bara PKP2B Kaltim saat ini tumbuh 4,16% (yoy). Sentimen positif datang dari India yang sektor manufakturnya ekspansi sejak awal 2014. Dari sisi harga batu bara terjadi perbaikan sehingga mendukung pertumbuhan produksi batubara Kaltim. Dengan arah kebijakan ekonomi makro yang akan direncanakan oleh pemerintah serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:

1. menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha.
3. Menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah.
4. Pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro.
5. Meningkatkan modal sosial.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD dan RPJPD, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdamai dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dan kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2014. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana

dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mampu membiayai seluruh kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Kondisi keuangan daerah yang ada saat ini, dimana masih tingginya tingkat ketergantungan kepada dana perimbangan keuangan daerah (dana transfer) disamping dana pembangunan dari APBN.

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan antara lain kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat otonomi fiskal daerah sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD.

1) Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. dibawah. Secara kumulatif, pendapatan di pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari elemen dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; serta dari pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari elemen lain-lain PAD yang sah (lihat tabel 3.1).

Hal menarik yang dapat diamati dari pembentukan pendapatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu yaitu besarnya transfer pusat yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang mencapai rata-rata 65,54% dari keseluruhan pendapatan. Besar kecilnya dana transfer ditentukan oleh besarnya hasil pengelolaan kekayaan alam daerah baik dari pertambangan maupun dari pajak dan kehutanan. Melihat skema bagi hasil yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara masih sangat bertumpu pada hasil kekayaan alam.

Tabel III.8
Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	4.654	7.708	3.364	2.45	2.477	3.85
▪ Pajak Daerah	0.06	0.07	0.08	0.07	0.20	0.43
▪ Retribusi Daerah	0.68	0.63	0.63	0.65	0.19	0.23
▪ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.02	1.29	0.64	0.54	0.39	0.46
▪ Lain-lain PAD yang sah	2.97	5.69	2.31	1.18	1.68	2.74
Dana Perimbangan	87.31	79.86	81.98	81.45	77.26	80,29
▪ Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak	82.66	74.91	81.44	70.90	65.82	65.54
▪ Dana Alokasi Umum	4.06	3.39	-	9.88	11.25	14.65
▪ Dana Alokasi Khusus	0.59	1.56	0.54	0.66	0.08	0.10
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	8.04	12.42	14.6	16.09	20.27	15.86
▪ Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	0.01
▪ Dana darurat	0.25	-	-	-	-	-
▪ Dana bagi hasil pajak dari propinsi	2.26	3.66	4.57	6.25	5.48	8.02
▪ Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0.32	0.75	4.07	2.84	1.49	2.60
▪ Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya	5.22	8.01	6.00	7.01	13.29	5.23
Pendapatan Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Angka dana perimbangan yang begitu tinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2013 yakni sebesar 80,29%. Gambaran ini menjelaskan bahwa daerah-daerah yang berada di propinsi Kalimantan Timur masih sangat menyandarkan pendapatannya pada sektor dana perimbangan yang berasal dari hasil kekayaan alam melalui pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Besarnya proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara membuat pengelolaan PAD kurang optimal. Namun jika menilik kondisi tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi dana perimbangan cenderung menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) agar kemandirian daerah dapat terus ditingkatkan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Tidak optimalnya pengelolaan pajak dapat dilihat dari fluktuatifnya perkembangan perolehan PAD (lihat tabel 3.1). Untuk itu diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Pemanfaatan kekayaan daerah merupakan peluang yang sangat besar bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan tanpa membebani masyarakat. Penguatan kinerja pemanfaatan BUMD di Kabupaten Penajam Paser Utara juga penting untuk memperkuat basis pendapatan asli daerah melalui pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemantapan rencana-rencana bisnis serta penguatan manajemen kelembagaan dan SDM, diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemanfaatan kekayaan daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada pembentukan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel III.9
Pertumbuhan Kemampuan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012 - 2013
Pendapatan	-21.71	24.97	25.5	25.45	-11.61
Pendapatan Asli Daerah	26.51	-71.9	-2.26	26.83	37.52%
▪ Pajak Daerah	4.55	34	7.59	272.71	82.04
▪ Retribusi Daerah	-12.54	-52.25	64.14	-63.28	8.39
▪ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.62	-50.22	11.44	-9.61	2.58
▪ Lain-lain PAD yang sah	36.37	-84.6	-45.65	78.57	43.45
Dana Perimbangan	-33.05	26.91	25.02	18.98	-8.14
▪ Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak	-34.29	30.99	14.43	16.63	-12.13
▪ Dana Alokasi Umum	-45.72	-	100,00	42.73	15.11
▪ Dana Alokasi Khusus	45.28	-116.1	39.17	-84.4	10.92
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	21.25	36.35	32.19	58	-30.85
▪ Pendapatan Hibah	-	-	-	-	100
▪ Dana darurat	-	-	-	-	
▪ Dana bagi hasil pajak dari propinsi	24.92	39.88	45.94	10.03	29.41
▪ Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	48.46	86.12	-6.97	-33.9	53.6
▪ Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	20.74	0.09	36.18	137.96	-65.22

Sumber : APDB Penajam Paser Utara, diolah

Dari tabel III.9 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008 s/d 2013 menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,5%. Terutama pertumbuhan sektor dana perimbangan dan sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,9% dan 23,4%. Pertumbuhan positif dari kedua sektor ini disebabkan karena meningkatnya realisasi pos-pos seperti pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; dan dana bagi hasil pajak dari propinsi. Pendapatan Asli Daerah juga terus mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun mengalami pertumbuhan yang negatif pada periode tahun 2009 s.d 2011, Pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2012 dan 2013, hal ini harus terus ditingkatkan mengingat pendapatan daerah kabupaten Penajam Paser Utara saat ini masih bertumpu pada dana perimbangan dari pusat dan provinsi Kalimantan timur yang bersumber pada kekayaan alam yang tidak terbaharukan yang sewaktu saat akan habis, sehingga akan berimbas pada pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser utara.

2). Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Tabel III.10
Proporsi Belanja Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. Belanja Langsung	62,78	73,85	77,15	71,30	73,78	70,48
▪ Belanja Pegawai	6,98	5,29	4,51	5,60	5,34	6,73
▪ Belanja Barang dan Jasa	13,59	23,22	18,44	17,93	15,79	17,14
▪ Belanja Modal	42,21	45,34	54,20	47,76	52,65	46,61
B. Belanja tidak Langsung	37,22	26,15	22,85	28,70	26,22	29,52
▪ Belanja Pegawai	21,36	18,48	16,81	21,66	20,15	22,79
▪ Belanja Hibah	5,28	1,22	2,10	1,87	2,31	3,10
▪ Belanja Bantuan Sosial	5,42	2,36	1,05	1,42	0,05	0,04
▪ Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	3,60	3,49
▪ Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	5,15	4,05	2,74	3,75	0,07	0,09
▪ Belanja tidak Terduga	0,01	0,03	0,15	0,01	0,03	0,00

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Dari Tabel III.10 menunjukkan terjadi peningkatan belanja langsung pada tahun anggaran 2012 dari angka 71,30% pada tahun 2011 menjadi angka 73,78% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 70,48%. Realisasi belanja langsung mengalami penurunan pada post belanja modal sebesar 6,04%, hal ini diakibatkan karena tidak dilaksanakannya kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan belanja modal. Meskipun persentase realisasi belanja langsung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap mengedepankan penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat ditunjukkan dengan lebih besarnya persentase belanja langsung yang mencapai 70,48% dibandingkan dengan belanja tidak langsung yang sebesar 29,52%.

Proporsi pada belanja bantuan sosial mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 5,24% dari tahun anggaran 2008 ke tahun anggaran 2013. Penurunan belanja sosial ini dilakukan karena menurunnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya kualitas kesehatan, serta makin tingginya pendapatan per kapita di Kabupaten Penajam Paser Utara. Walaupun demikian perlu diperhatikan bahwa belanja bantuan sosial masih memegang

peranan penting mengingat persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara masih cukup besar. Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai wilayah yang luas dengan tingkat kemajuan yang berbeda di masing-masing wilayah. Rendahnya belanja bantuan sosial ini tentu saja berdampak pada menurunnya kemampuan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menekan angka kemiskinan. Padahal pemerataan kesejahteraan diperlukan agar seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menikmati hasil pembangunan.

Tabel III.11
Pertumbuhan Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

Uraian	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012 - 2013
Belanja	34.85	16.31	6.03	15.16	7.33
▪ Belanja Langsung	44.61	15.26	3.87	18.01	2.54
▪ Belanja Tidak Langsung	7.27	19.14	11.38	7.11	20.83

Pada Tabel III.11 memperlihatkan rata-rata pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan belanja langsung paling tinggi berada pada tahun anggaran 2008-2009 yang mencapai angka 44,61%. Pertumbuhan yang begitu tinggi pada sektor belanja langsung, disumbang oleh besarnya belanja pada pos belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung mencapai angka pertumbuhan paling tinggi pada tahun anggaran 2009-2010. Pertumbuhan sektor belanja tidak langsung yang begitu tinggi, paling besar disumbang oleh pos belanja pegawai. Walaupun proporsi belanja pegawai pada sektor belanja langsung dan tidak langsung mengalami peningkatan dan penurunan, namun fluktuasi belanja ini tidaklah tajam. Belanja pegawai sendiri merupakan belanja kedua terbesar yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara setelah pengeluaran belanja modal. Berikut secara rinci ditunjukkan rata-rata pertumbuhan pengeluaran pada pos belanja pegawai di sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel III.12
Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah Tahun 2008-2013
Kabupaten Penajam Paser Utara (%)

NO.	URAIAN	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
A	Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	22.1	20.69	11.96	7.12
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	31.85	0.57	-12.06	57.64
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	-1.96	2.35	-7.66	12.88
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0.16	-34.54	74.16	-2.2
B	Belanja Langsung				
1	Belanja Honorarium PNS	0.85	42.8	-7.89	29.44
2	Belanja Uang Lembur	3.44	15.73	26.14	8.75
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-73.24	-16.9	201.2	-27.32
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-2.56	-12.17	40.73	12.34
5	Belanja premi asuransi kesehatan	34.87	-53.89	-0.005	-3.11
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	-67.25	30.36	22.1	15.51
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	26.8	-27.62	-1.77	15.55
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	235.73	-35.15	5.13	69.94
9	Belanja perjalanan dinas	6.11	13.65	38.1	11.16
10	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubel, peralatan dan perlengkapan dll)	-10.36	101.26	-42.317	6.93

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pada Tabel III.12 menunjukkan di sektor belanja langsung, selalu terjadi peningkatan pada pos belanja aparatur di tahun 2009 hingga tahun 2012. Peningkatan sektor belanja langsung disumbang oleh pos belanja gaji dan tunjangan, belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH honorarium PNS, dan belanja pemungutan pajak daerah. bahwa terjadi pertumbuhan positif pada pos belanja pegawai di sektor belanja tidak langsung.

Pos belanja pegawai pada sektor belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 59,75% pada tahun anggaran 2010-2011, walaupun pada tahun anggaran 2011-2012 pos belanja ini kembali menurun sebesar 19,31%. Kenaikan pada pos belanja pegawai ini disumbang oleh meningkatnya belanja pada pos belanja honorarium PNS, belanja makanan dan minuman pegawai dan belanja modal. belanja uang lembur, belanja makanan dan

minuman pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja modal. Sedangkan pada tahun anggaran 2010-2011, terjadi penurunan pada beberapa pos belanja, misalnya belanja beasiswa pendidikan PNS dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Pos belanja yang mengalami pertumbuhan negatif ini sangat disayangkan mengingat bahwa pos belanja tersebut disadari sebagai instrumen tepat bagi pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur negara. Pengurangan pada pos belanja ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat itu belum menempatkan pengembangan sumber daya aparatur negara sebagai prioritas dalam pembangunan birokrasi publik. Namun pada tahun anggaran 2011-2012, pos belanja beasiswa pendidikan PNS dan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS mengalami peningkatan dengan angka yang sangat signifikan yakni 201,2% dan 40,73%. Artinya pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mulai menempatkan pengembangan sumber daya aparatur sebagai program strategis di dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan pos belanja pakaian khusus hari-hari tertentu yang pada tahun anggaran 2009-2010 meningkat sangat tinggi sebesar 235,73% mulai menurun pada tahun anggaran 2010-2011. Selain itu, pos belanja modal yang pada tahun anggaran 2010-2011 meningkat sangat tajam, mulai menurun pada tahun anggaran 2011-2012 sebesar 42,317%, hal ini memperlihatkan efisiensi pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3). Neraca Daerah

Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah di tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dari banyak permasalahan yang menjadi penghambat, ternyata masalah penyajian aset daerah merupakan salah satu faktor penyebab. Dilihat dari Neraca Daerah, ternyata lebih dari 34% dari nilai kekayaan daerah berupa aset tetap. Namun

demikian jika dicermati sebagian besar dari aset tersebut tidak jelas asal usulnya, nilainya maupun status kepemilikannya.

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Saldo akhir ekuitas dana Per 31 Desember 2013 Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp4.265.780.376.365,69. Jika dibandingkan dengan saldo akhir ekuitas Per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.763.069.601.339,51, saldo akhir Per 31 Desember 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp502.710.775.026,18 atau 13,36%.

Peningkatan ekuitas dana tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp591.957.484.281,50 Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertanam dalam dana cadangan.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2010-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel III.13
Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2013
Kabupaten Penajam Paser Utara

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
		%	%	%	%
1	Rasio lancar (current ratio)	639,33	959,88	969,26	1457,22
2	Rasio quick (quick ratio)	630,29	947,74	955,65	1413,75
3	Rasio total hutang terhadap total aset	1,44	1,19	1,18	0,52
4	Rasio hutang terhadap modal	1,46	1,21	1,19	0,53
5	Rata-rata umur piutang	-	-	-	-
6	Rata-rata umur persediaan	-	-	-	-

Sumber: Neraca Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel III.13 dapat terlihat bahwa rasio lancar Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun anggaran 2010 s/d 2013 sangat tinggi yakni 639,33%, 959,88%, 969,26% dan 1457,22. Rasio lancar ini menunjukkan bahwa Penajam Paser Utara memiliki aset yang sangat cukup untuk melunasi hutangnya. Di sisi lain, rasio cepat Kabupaten Penajam Paser Utara juga sangat tinggi. Besaran rasio cepat pada tahun anggaran 2010 s/d 2012 yakni 630,29%, 947,74% dan 955,65% dan semakin meningkat pada tahun 2013 menjadi 1413,75. Dari angka ini dapat memperlihatkan kecepatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam membayar atau melunasi utang lancarnya. Namun rasio lancar dan rasio cepat yang sangat tinggi dan terus naik dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kurang efisien dalam mengelola aktiva lancar dan persediaannya. Dengan kata lain, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesehatan keuangan yang belum baik.

4). Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.

Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran (dalam juta rupiah) 2008 s/d 2014
Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp Juta)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
A. Pendapatan	814.914	669.555	892.389	1.197.891	1.502.747	1.328.318.	1.334.160
B. Belanja	564.642	866.654	1.035.602	1.102.006	1.298.863	1.394.134	1.442.060
▪ Belanja Tidak Langsung	210.173	226.662	280.322	316.321	340.543	411.492	489.751
▪ Belanja Langsung	354.469	639.992	755.280	785.685	958.320	982.641	982.551
Surplus (Defisit) (A-B)	250.272	-197.092	-143.212	95.885	203.882	- 65,815	- 107.889

Sumber: APBD Penajam Paser Utara, diolah

Pada tabel III.14 dapat terlihat selisih belanja dari pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tahun anggaran 2008, terjadi surplus sebesar 250.271.683.003,29. Namun, pada tahun anggaran 2009 dan 2010

terjadi defisit sebesar 197.098.598.843,17 dan 143.212.469.774,13. Defisit anggaran ini menandakan kekurangan dalam kas keuangan disebabkan adanya ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan dan pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Defisit pada tahun 2010 ini diakibatkan oleh meningkatnya belanja pegawai pada sektor belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2010. Artinya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Namun pada tahun anggaran 2011 dan 2012, terjadi surplus kembali yakni sebesar 95.885.087.383,39 dan 203.882.932.186 pada tahun anggaran 2013 terjadi defisit sebesar 65.815.405.193 . Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki ekuitas yang positif yakni belanja yang dilakukan tidak besar dari total pendapatan yang diterima meskipun terjadi kembali defisit anggaran ditahun 2013 namun tetap dapat tertutupi dari sumber pembiayaan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya. Berikut dapat dilihat tabel realisasi anggaran pembiayaan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2012 – 2014.

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 s/d 2014 (Rp juta)

No.	Uraian	2012	2013	2014
A	Penerimaan Pembiayaan	173,458,148,958.55	362,724,08,279.47	267.955.498.353,85
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	173,458,148,958.55	362,724,08,279.47	
	Pencairan Dana Cadangan			
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14,616,992,865.00	28,953,184,733.00	4.563.207.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan			
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	-	3.004.481.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	13,616,992,865.00	28,953,184,733.00	1.558.726.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	362,724,088,279.47	267,955,498,353.00	155.493.009.563,12

Pada tahun anggaran 2008 sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) cukup besar yakni 483.815.372.507,00 Sedangkan pada tahun anggaran 2012, terdapat surplus Silpa sebesar 362.724.088.279,00 dan 267,955,498,353.00 pada tahun 2013. Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baik. Namun, adanya Silpa yang sangat besar justru mengindikasikan buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tingginya Silpa membuktikan bahwa penyerapan anggaran di daerah itu sangat rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran yakni lemahnya perencanaan program, kinerja birokrasi yang menurun serta upaya kesengajaan untuk memperbesar Silpa.

3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability public service) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2015 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2014;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 26 Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pengelompokan pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan asli daerah (PAD), terdiri dari:

- 1). Pajak daerah;
- 2). Retribusi daerah;
- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan, terdiri dari:

- 1). Dana bagi hasil;
- 2). Dana alokasi umum (DAU);
- 3). Dana alokasi khusus (DAK);

c. Lain-lain pendapatan daerah, terdiri dari:

- 1). Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2). Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- 3). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- 4). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara agar dapat memenuhi dan atau melampaui target yang telah ditetapkan, maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.

- b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada pendapatan asli daerah (PAD) pada khususnya dan kepada penerimaan daerah pada umumnya.
- d. Merumuskan berbagai peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2014 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.16
Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Rp)

URAIAN PENERIMAAN	TAHUN 2014	MURNI TAHUN 2015	PERUBAHAN 2015
PENDAPATAN	1.334.160.954.787,27	1.817.454.654.984,00	1.336.909.330.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.701.877.922,27	70.747.600.000,00	70.747.600.000,00
PAJAK DAERAH	9.179.662.866,39		
HASIL RETRIBUSI DAERAH	2,927.826.891,35		
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.261.236.063,84		
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	37.333.152.100,69		
DANA PERIMBANGAN	1.063.414.629.665,00	1.504.825.301.984,00	1.019.902.466.000,00
BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	873.038.843.665,00	1.362.050.015.984,00	875.180.280.000,00
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	188.713.598.000,00	138.285.466.000,00	138.285.466.000,00
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	1.662.188.000,00	4.489.820.000,00	4.489.820.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	216.044.447.200,00	241.881.753.000,00	246.259.264.000,00
PENDAPATAN HIBAH			
DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	96.379.621.200,00	94.978.654.000,00	94.978.654.000,00
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	40.920.526.000,00	55.819.499.000,00	60.197.010.000,00
BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	78.744.300.000,00	91.083.600.000,00	91.083.600.000,00

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015, akan meliputi :

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat baik kuratif maupun preventif;
3. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kegiatan agrobisnis yang berdaya saing dan pemantapan pasar yang jelas dan prospektif.
4. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan peran UKM dan Koperasi dalam perekonomian masyarakat.
5. Memperbesar kemampuan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang diimbangi dengan keberpihakan pada masyarakat miskin;
6. Meningkatkan kemampuan dan standard kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana pelayanan dasar;
8. Mendorong terselenggaranya pembangunan desa yang terpadu dan holistik yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya masyarakat perdesaan;
9. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.

Tabel III.17
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2013, tahun 2014 dan target Tahun 2015

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	MURNI 2015	PERUBAHAN 2015
2	BELANJA	1,394,134,043,657.32	1.442.060.236.578,00	2.062.410.153.337,00	1.650.737.795.167,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	411,492,318,686.00	478.524.613.634,00	579.950.543.492,00	576.869.842.876,00
2.1.1	Belanja Pegawai	317,785,917,253.00	381.769.085.755,00	457.951.181.500,00	
2.1.2	Belanja Bunga			-	
2.1.3	Belanja Subsidi			-	
2.1.4	Belanja Hibah	43,253,076,159.00	39.328.404.928,00	28.089.992.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	597,000,000.00	1.611.000.000,00	710.000.000,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa	48,643,300,000.00		-	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/ kota Dan Pemerintahan Desa	1,213,025,274.00	55.481.203.602,00	92.199.369.992,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	334.919.349,00	1.000.000.000,00	
2.2.	BELANJA LANGSUNG	982,641,724,971.32	1,282,711,723,648.00	1.482.459.609.845,00	1.073.867.952.291,00
2.2.1.	Belanja Pegawai	93,796,231,175.00	119,664,069,600.00	115.909.205.980,00	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239,001,468,852.32	363,214,928,973.00	370.464.175.400,00	
2.2.3	Belanja Modal	649,844,024,944.00	799,832,725,075.00	996.086.228.465,00	

Adapun Pagu Indikatif keseluruhan SKPD berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam anggaran perubahan Tahun 2015 sebesar Rp. 1.650.737.795.167,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.18
Rencana Pagu Indikatif Belanja SKPD Tahun Anggaran 2014 & Tahun 2015

Kode	Uraian	Belanja Murni 2015	Prosentase	Belanja Perubahan 2015	Prosentase
1.	URUSAN WAJIB	Rp. 2.014.008.890.749,00	96,48%	Rp. 1.581.420.233.226,00	96,03%
1.01.	PENDIDIKAN	Rp. 11.996.893.192,00	24,53%	Rp. 375.017.496.502,00	22,72%
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp. 511.996.893.192,00	24,53%	Rp. 375.017.496.502,00	22,72%
1.02.	KESEHATAN	Rp. 187.129.116.243,00	8,96%	Rp. 162.575.520.379,00	9,85%
1.02.01	Dinas Kesehatan	Rp. 102.889.256.306,00	4,93%	Rp. 97.546.060.306,00	5,91%
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 84.239.859.937,00	4,04%	Rp. 65.029.460.073,00	3,94%
1.03	PEKERJAAN UMUM	Rp. 606.026.933.272,00	29,03%	Rp. 370.725.413.272,00	22,46%
1.03.03	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 606.026.933.272,00	29,03%	Rp. 370.725.413.272,00	22,46%
1.04	PERUMAHAN				
1.05	PENATAAN RUANG				
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rp. 18.103.918.000,00	0,87%	Rp. 15.763.782.000,00	0,95%
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan	Rp. 18.103.918.000,00	0,87%	Rp. 15.763.782.000,00	0,95%
1.07	PERHUBUNGAN	Rp. 104.204.142.450,00	4,99%	Rp. 93.683.228.450,00	5,68%
1.07.01	Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata	Rp. 104.204.142.450,00	4,99%	Rp. 93.683.228.450,00	5,68%
1.08	LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 36.908.510.909,00	1,77%	Rp. 34.448.404.293,00	2,09%
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 6.328.692.616,00	0,30%	Rp. 5.705.066.000,00	0,35%
1.08.02	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman	Rp. 30.579.818.293,00	1,46%	Rp. 28.743.338.293,00	1,74%
1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp. 7.578.954.995,00	0,36%	Rp. 7.488.090.995,00	0,45%

1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 7.578.954.995,00	0,36%	Rp. 7.488.090.995,00	0,45%
1.12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Rp. 6.279.779.436,00	0,30%	Rp. 5.700.495.436,00	0,35%
1.12.01	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 6.279.779.436,00	0,30%	Rp. 5.700.495.436,00	0,35%
1.13	SOSIAL	Rp. 11.242.873.256,00	0,54%	Rp. 10.797.873.256,00	0,65%
1.13.01	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Rp. 11.242.873.256,00	0,54%	Rp. 10.797.873.256,00	0,65%
1.14	KETENAGAKERJAAN				
1.15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1.16	PENANAMAN MODAL	Rp. 6.019.551.443,00	0,29%	Rp. 5.470.711.443,00	0,33%
1.16.01	Badan Pelayanan Perizinann Terpadu dan Penanaman Modal	Rp. 6.019.551.443,00	0,29%	Rp. 5.470.711.443,00	0,33%
1.17	KEBUDAYAAN		0,00%		
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Rp. 35.915.079.695,00	1,72%	Rp. 35.833.491.695,00	2,17%
1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 4.689.272.555,00	0,22%	Rp. 4.265.348.555,00	0,26%
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 15.284.826.549,00	0,73%	Rp. 15.627.162.549,00	0,95%
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 15.940.980.591,00	0,76%	Rp. 15.940.980.591,00	0,97%
1.20	OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	Rp. 459.247.263.067,00	22,00%	Rp. 442.832.320.714,00	27,06%
1.20.00	PPKD	Rp. 121.999.361.992,00	5,84%	Rp. 131.637.749.992,00	7,97%
1.20.01	DPRD	Rp. 8.624.152.808,00	0,41%	Rp. 8.624.152.808,00	0,52%
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.840.040.204,00	0,09%	Rp. 1.840.040.204,00	0,11%

1.20.03	Sekretariat Daerah	Rp. 134.764.146.185,00	6,46%	Rp. 128.515.222.185,00	7,79%
1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	Rp. 53.913.603.519,00	2,58%	Rp. 48.649.003.519,00	2,95%
1.20.05	Inspektorat	Rp. 8.863.101.000,00	0,42%	Rp. 8.758.029.000,00	0,53%
1.20.06	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 11.201.551.030,00	0,54%	Rp. 7.803.651.030,00	0,47%
1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 22.571.480.196,00	1,08%	Rp. 21.982.040.196,00	1,33%
1.20.08	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 31.472.452.910,00	1,51%	Rp. 26.699.692.910,00	1,62%
1.20.09	Kecamatan Penajam	Rp. 4.342.566.432,00	0,21%	Rp. 4.261.614.432,00	0,26%
1.20.10	Kecamatan Waru	Rp. 3.191.302.139,00	0,15%	Rp. 2.557.690.139,00	0,15%
1.20.11	Kecamatan Babulu	Rp. 4.600.279.858,00	0,22%	Rp. 4.234.663.858,00	0,26%
1.20.12	Kecamatan Sepaku	Rp. 3.466.309.369,00	0,17%	Rp. 3.322.657.369,00	0,20%
1.20.13	Kelurahan Penajam	Rp. 2.565.194.058,00	0,12%	Rp. 2.565.194.058,00	0,16%
1.20.14	Kelurahan Gunung Seteleng	Rp. 2.112.755.334,00	0,10%	Rp. 2.068.331.334,00	0,13%
1.20.15	Kelurahan Nenang	Rp. 1.853.085.009,00	0,09%	Rp. 1.853.085.009,00	0,11%
1.20.16	Kelurahan Nipah-nipah	Rp. 2.327.557.710,00	0,11%	Rp. 2.276.641.710,00	0,14%
1.20.17	Kelurahan Sungai Parit	Rp. 2.086.044.752,00	0,10%	Rp. 2.064.276.752,00	0,13%
1.20.18	Kelurahan Lawe-Lawe	Rp. 1.874.216.685,00	0,09%	Rp. 1.831.280.685,00	0,11%
1.20.19	Kelurahan Petung	Rp. 1.911.732.836,00	0,09%	Rp. 1.889.700.836,00	0,11%
1.20.20	Kelurahan Saloloang	Rp. 1.925.690.155,00	0,09%	Rp. 1.882.058.155,00	0,11%
1.20.21	Kelurahan Tanjung Tengah	Rp. 2.078.186.860,00	0,10%	Rp. 2.070.950.860,00	0,13%
1.20.22	Kelurahan Pejala	Rp. 1.972.276.467,00	0,09%	Rp. 1.950.292.467,00	0,12%
1.20.23	Kelurahan Kampung Baru	Rp. 2.067.255.083,00	0,10%	Rp. 2.030.763.083,00	0,18%
1.20.24	Kelurahan Sesumpu	Rp. 2.977.171.821,00	0,14%	Rp. 2.955.139.821,00	0,12%
1.20.25	Kelurahan Sotek	Rp. 2.052.575.104,00	0,10%	Rp. 1.999.115.104,00	0,12%
1.20.26	Kelurahan Buluminung	Rp. 2.016.707.889,00	0,10%	Rp. 1.983.095.889,00	0,12%
1.20.27	Kelurahan Sepan	Rp. 1.836.302.172,00	0,09%	Rp. 1.821.614.172,00	0,11%
1.20.28	Kelurahan Riko	Rp. 1.656.757.200,00	0,08%	Rp. 1.634.989.200,00	0,10%
1.20.29	Kelurahan Gresik	Rp. 1.750.641.470,00	0,08%	Rp. 1.721.781.470,00	0,10%

1.20.30	Kelurahan Pantai Lango	Rp. 1.690.147.754,00	0,08%	Rp. 1.661.395.754,00	0,10%
1.20.31	Kelurahan Jenebora	Rp. 2.028.963.893,00	0,10%	Rp. 2.119.221.893,00	0,13%
1.20.32	Kelurahan Sepaku	Rp. 1.572.743.144,00	0,08%	Rp. 1.546.493.144,00	0,09%
1.20.33	Kelurahan Mentawir	Rp. 1.785.738.539,00	0,09%	Rp. 1.761.474.539,00	0,11%
1.20.34	Kelurahan Pemaluan	Rp. 1.722.758.313,00	0,08%	Rp. 1.686.710.313,00	0,10%
1.20.35	Kelurahan Maridan	Rp. 2.310.049.137,00	0,11%	Rp. 2.259.217.137,00	0,14%
1.20.36	Kelurahan Waru	Rp. 2.222.364.040,00	0,11%	Rp. 2.169.756.040,00	0,13%
1.21	KETAHANAN PANGAN	Rp. 10.750.768.615,00	0,52%	Rp. 8.596.282.615,00	0,52%
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	Rp. 10.750.768.615,00	0,52%	Rp. 8.596.282.615,00	0,52%
1.22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp. 8.952.300.424,00	0,43%	Rp. 8.834.316.424,00	0,54%
1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan dan Desa	Rp. 8.952.300.424,00	0,43%	Rp.8.834.316.424,00	0,5 4%
1.23	STATISTIK				
1.24	KEARSIPAN	Rp. 3.652.805.752,00	0,17%	Rp. 3.652.805.752,00	0,22%
1.24.01	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 3.652.805.752,00	0,17%	Rp. 3.652.805.752,00	0,22%
1.25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.26	PERPUSTAKAAN				
2.	URUSAN PILIHAN	Rp. 73.401.262.588,00	3,52%	Rp. 65.461.095.588,00	3,97%
2.01	PERTANIAN	Rp. 20.869.903.000,00	1,00%	Rp. 20.362.279.000,00	1,23%
2.01.01	Dinas Pertanian	Rp. 20.869.903.000,00	1,00%	Rp. 20.362.279.000,00	1,23%
2.02	KEHUTANAN	Rp. 18.197.386.601,00	0,87%	Rp. 12.187.087.601,00	0,74%
2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 18.197.386.601,00	0,87%	Rp. 12.187.087.601,00	0,74%
2.03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rp. 6.194.723.519,00	0,30%	Rp. 6.105.179.519,00	0,37%
2.03.01	Dinas Pertambangan	Rp. 6.194.723.519,00	0,30%	Rp. 6.105.179.519,00	0,37%
2.04	PARIWISATA				

2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 14.077.064.090,00	0,67%	Rp. 13.634.504.090,00	0,83%
2.05.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Rp. 14.077.064.090,00	0,67%	Rp. 13.634.504.090,00	0,83%
2.06	PERDAGANGAN	Rp. 14.062.185.378,00	0,67%	Rp. 13.172.045.378,00	0,80%
2.06.01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 14.062.185.378,00	0,67%	Rp. 13.172.045.378,00	0,80%
2.08	KETRANSMIGRASIAN				
	Jumlah	Rp. 2.087.410.153.337,00	100%	Rp. 1.650.737.795.167,00	100%

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2015 di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi seimbang.
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis.

Tabel III.18
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d 2015

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	ANGGARAN MURNI TAHUN 2015	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2015
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	362.724.088.279,47	267.955.498.353,85	267.955.498.353,00	156.459.556.950,12
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	362.724.088.279,47	267.955.498.353,85	267.955.498.353,00	156.459.556.950,12
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	28.953.184.733,00	4.563.207.000,00	23.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	3.004.481.000,00	23.000.000.000,00	25.000.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	28.953.184.733,00	1.558.726.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	333.770.903.546,47	263.392.291.353,85	-41.888.873.147,00	131.459.556.950,12

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR